

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT UTAMA BNN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Utama (Settama) BNN Tahun 2023 merupakan gambaran program kerja Settama BNN dalam 1 (satu) tahun mendatang yang dijabarkan dari Rencana Strategis Settama BNN 2020–2024 dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) BNN tahun 2023.

Dokumen RKT Settama BNN 2023 memuat sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.

Rencana kinerja program dan kegiatan pada RKT Settama BNN 2023 menjadi dokumen sumber bagi perumusan Perjanjian Kinerja Settama BNN Tahun 2023, yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan BNN di tahun 2023.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah kita rencanakan. Amin.

Jakarta, Desember 2022

Sekretaris Utama BNN



Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Isu Permasalahan

Settama BNN memiliki peran cukup strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba melalui pemberian layanan berupa koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN. Peran strategis tersebut menuntut kapasitas dan kapabilitas yang optimal dari unit-unit organisasi pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan di lingkungan Settama BNN.

Sementara itu, sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, isu dan permasalahan tahun 2023 yang dihadapi Settama BNN dalam menjalankan tugas dan fungsi kesekretariatan juga semakin kompleks. Isu dan permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Isu Tata Kelola Reformasi Birokrasi (RB)

Manajemen pelaksanaan agenda RB masih berfokus pada unit kerja pusat di lingkungan BNN dan belum terkelola baik pada unit kerja vertikal sehingga kurang berdampak signifikan terhadap perubahan.

b. Isu Akuntabilitas

Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja belum optimal. Penjenjangan kinerja pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggambarkan pemecahan masalah secara utuh sesuai kondisi dihadapi. Hal tersebut mengakibatkan hubungan lintas fungsi antar unit kerja dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi belum terbangun baik. Keberadaan instrumen pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang ada juga belum mendukung sepenuhnya kualitas pengukuran capaian kinerja.

c. Isu Penguatan Organisasi dan Tata Kerja

Isu menonjol terkait penguatan organisasi yaitu belum maksimalnya fungsi dan peran instansi vertikal BNN dalam memberikan pelayanan P4GN kepada masyarakat di wilayah yang belum terdapat BNN Kabupaten/Kota.

Sementara isu menyangkut tata kerja yaitu belum adanya aturan internal terkait mekanisme kerja aparatur BNN yang telah mengadaptasi kebijakan sistem kerja penyederhanaan birokrasi sebagai upaya mengubah pola pikir dan sistem kerja yang semula hierarkis dan terkotak-kotak menjadi lebih lincah, fleksibel, dan kolaboratif-lintas fungsi guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.

d. Isu Manajemen Kepegawaian

Beberapa isu menonjol terkait manajemen kepegawaian di antaranya yakni tidak sedikit aparatur BNN yang belum memahami keselarasan antara kinerja individu dan kinerja organisasi, beberapa layanan kepegawaian yang masih dilakukan secara manual, serta pengelolaan jabatan fungsional yang belum sepenuhnya terfasilitasi dengan baik.

e. Isu Pengelolaan Kinerja Keuangan

Isu pengelolaan kinerja keuangan yang masih sering ditemui terkait yaitu ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang mempengaruhi kualitas perencanaan anggaran.

f. Isu Sarana dan Prasarana Perkantoran

Beberapa isu menonjol terkait sarana dan prasarana perkantoran di antaranya yakni kondisi beberapa sarana perkantoran yang kurang layak pakai (seperti kendaraan pejabat pimpinan tinggi) dan kondisi beberapa gedung instansi vertikal BNN yang membutuhkan perbaikan dan/atau masih berstatus sewa/pinjam.

g. Isu Kehumasan

Isu kehumasan yang menonjol terkait masih belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya bidang kehumasan di instansi vertikal BNN.

2. Hasil Evaluasi

Peran Settama BNN dalam memberikan dukungan layanan kesekretariatan telah menghasilkan capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)

BNN memperoleh Nilai AKIP tahun 2021 sebesar 66,60 di bawah target capaian dokumen perjanjian kinerja (70) dan tergolong dalam predikat "B" di rentang awal (>60–70). Nilai AKIP yang diperoleh BNN menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Nilai AKIP BNN masing berada di bawah nilai AKIP rata-rata kementerian/lembaga (nasional), yaitu 71,30. Aspek perencanaan dan pengukuran kinerja menjadi *area of improvement* yang menjadi prioritas.

b. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi tahun 2021 memiliki capaian sebesar 80,73, atau 99,67% dari target pada dokumen perjanjian kinerja (81).

Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran memiliki nilai indeks kepuasan pelayanan sebesar 80,48 atau berkategori "Baik". Sementara Layanan Bidang Keuangan memiliki nilai indeks kepuasan pelayanan sebesar 87,5 atau berkategori "Sangat Baik". Dan Layanan Kepegawaian dan Organisasi memiliki nilai indeks kepuasan pelayanan sebesar 74,02 atau berkategori "Baik".

Capaian indeks per layanan menunjukkan bahwa layanan kepegawaian dan organisasi menjadi fokus prioritas agenda kinerja penyelenggaraan organisasi.

c. Opini Kepercayaan Publik Terhadap BNN

BNN memperoleh Opini Kepercayaan Publik melalui hasil pengumpulan dan tabulasi data kuesioner jajak pendapat kepada masyarakat sebesar 85,72 di tahun 2021, melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (70). Hal tersebut

mengindikasikan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan program dan kegiatan P4GN yang telah sesuai mandat kelembagaan BNN.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
11. Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
12. Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2023.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Settama BNN menetapkan RKT 2023 sesuai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, dengan tetap mempedomani Renja BNN Tahun 2023. Rencana Program Kerja Settama BNN Tahun 2023 memiliki beberapa fokus sebagai berikut:

- Melakukan penguatan fungsi Tim RB Internal, asesor, dan Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi RB pada unit kerja serta memastikan berjalannya tindak-lanjut perbaikan.
- Melakukan redesain penjenjangan kinerja yang memenuhi prinsip logis hubungan sebab-akibat serta pemecahan masalah secara utuh sesuai kondisi dihadapi.
- Melakukan perbaikan instrumen pengukuran dan pengukuran data kinerja.
- Melakukan evaluasi kelembagaan terkait penguatan peran dan fungsi instansi vertikal BNN dalam rangka perluasan wilayah pelayananan P4GN.
- Menyusun pedoman sistem kerja aparatur BNN yang lincah, fleksibel, dan kolaboratif.
- Meningkatkan layanan pengelolaan administrasi kepegawaian dan fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional.
- Melakukan peremajaan dan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran.
- Melakukan Kajian Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pembangunan Gedung Instansi Vertikal BNN.
- Melakukan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sumber daya kehumasan.
- Melakukan Kajian Pendahuluan (*Background Study*) Penyusunan Rencana Strategis BNN 2025–2029 dan Kajian Persiapan BNN Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Adapun penetapan target kinerja dan kebutuhan pendanaan Settama BNN Tahun 2023 sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (RIBU)
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	75	1.009.849.627
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	82	
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	90	
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	93	17.865.671
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	3,4	18.378.994
		Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana	86%	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100	585.383.140
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3,3	373.945.377
		Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/ Jasa	3,3	
Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolanan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokolanan yang optimal	Indeks Layanan Kehumasan	3,65	14.276.445
		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokolanan	86%	

BAB III

PENUTUP

Dokumen RKT Settama BNN Tahun 2023 menggambarkan target kinerja dan anggaran kumulatif program kesekretariatan dari seluruh unit kerja pusat dan vertikal di lingkungan BNN. RKT Settama BNN Tahun 2023 ini akan menjadi dokumen sumber bagi penetapan perjanjian kinerja unit kerja di lingkungan Settama BNN untuk tahun 2023. Dengan demikian, dokumen RKT Settama BNN Tahun 2023 juga menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan di tahun anggaran 2023.

Demikian RKT Settama BNN Tahun 2023 ini disusun sebagai bagian dari kesinambungan proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.

LAMPIRAN I
RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KESEKRETARIATAN

(RIBU)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PUSAT		VERTIKAL		TOTAL	K/P (*)
		ALOKASI	%	ALOKASI	%		
066.01	Dukungan Manajemen	484.263.247	48	525.586.380	52	1.009.849.627	
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan	354.644.359	61	230.738.781	39	585.383.140	58,0%
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan SDM	13.115.454	71	5.263.540	29	18.378.994	1,8%
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	10.125.399	57	7.740.272	43	17.865.671	1,8%
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	96.822.720	26	277.122.657	74	373.945.377	37,0%
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	9.555.315	67	4.721.130	33	14.276.445	1,4%

(*) K/P adalah persentase anggaran per kegiatan terhadap total anggaran program

LAMPIRAN II
RINCIAN JENIS BELANJA PROGRAM KESEKRETARIATAN

(RIBU)

JENIS BELANJA	PUSAT		VERTIKAL		TOTAL
	ALOKASI	%	ALOKASI	%	
					1.009.849.627
51 - Belanja Pegawai	342.367.071	62	205.842.149	38	548.209.220
52 - Belanja Barang	129.111.776	29	313.110.678	71	442.222.454
53 - Belanja Modal	12.784.400	66	6.633.553	34	19.417.953

LAMPIRAN III
RINCIAN OUTPUT PROGRAM KESEKRETARIATAN

(RIBU)

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	VOL	SATUAN	ALOKASI
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	571.033.673
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	216	Dokumen/ Laporan	14.349.467
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.717.621
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	695	Layanan	16.661.373
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN			
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	208	Dokumen	11.518.439
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	208	Laporan	5.623.342
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	723.890
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Saran dan Prasarana			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
EBA.956	Layanan BMN	208	Layanan	12.875.422
EBA.962	Layanan Umum	208	Layanan	51.299.251
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.485	Layanan	287.742.123
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.013	Unit	10.728.520
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	14	Unit	8.145.808
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	206	Dokumen	3.154.253
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	VOL	SATUAN	ALOKASI
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	208	Layanan	11.982.552
EBA.959	Layanan Protokoler	1	Layanan	2.293.893